

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini seiring dengan tingginya pemahaman manusia tentang syariat Islam membuat manusia bertantang untuk melakukannya tidak terkecuali di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi mulai nampak terjadi pergeseran pola pikir masyarakat yang dulunya melakukan simpan pinjam di bank-bank konvensional kini beralih menuju bank atau lembaga syariah yang berbasis pada orientasi ekonomi Islam. Tidak terkecuali perbankan yang melirik dunia syariah melainkan juga koperasi. Banyak sekali koperasi-koperasi yang mulai menerapkan konsep syariah. Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.¹ Jika melihat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia

¹Nur S. Buchori, 2009, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, hal. 12

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.² Maka tidak heran muncul lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal pengembangan perekonomian Indonesia.

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (*berjemaah*) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan Syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.³

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa pengertian “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Dan pada Pasal 1 ayat (16) pengertian “Unit Simpan Pinjam

²Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

³Nur S. Buchori, *Op.Cit.*, hal. 15

adalah salah satu unit usaha koperasi non-koperasi simpan pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.”⁴

Pada Koperasi Syariah untuk usaha produktif salah satunya, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip Jual Beli (Murabahah). Menurut Mohammad Hoessein, Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan demikian yang dimaksud Pembiayaan Murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam jangka waktu yang ditentukan.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian studi kasus dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA UNIT SIMPAN PINJAM SYARIAH SINAR MENTARI KERJO KARANGANYAR”.

⁴Pasal 1 ayat (1) dan ayat (16) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

⁵Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hal. 26

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah Sinar Mentari Kerjo Karanganyar?
2. Bagaimana upaya penyelamatan terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberikan kegunaan yang jelas. Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah Sinar Mentari Kerjo Karanganyar.
2. Untuk mengetahui upaya penyelamatan terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang Hukum Perdata tentang Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan pengalaman penelitian yang berkaitan dengan Hukum Perdata tentang Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah.
- b. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai Hukum Perdata khususnya tentang Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenis produknya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non-bank memiliki ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari lembaga keuangan berdasarkan syariah, dan lembaga keuangan yang bersifat konvensional. Khusus untuk lembaga keuangan syariah non-bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam Lembaga Keuangan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia.

Ditinjau dari kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikategorikan sebagai Unit Simpan Pinjam (USP). Badan

hukum Koperasi Syariah dianggap sah setelah akta pendiriannya dikeluarkan oleh Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi Daerah untuk keanggotaannya wilayah Kabupaten/Kodya, sedangkan untuk keanggotaannya meliputi provinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi provinsi yang bersangkutan.⁶

Menurut Mohammad Hoessein, Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan demikian yang dimaksud Pembiayaan Murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam jangka waktu yang ditentukan.⁷

⁶Nur S. Buchori, *Op.Cit.*, hal. 14

⁷Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., *Op.Cit.*, hal. 26

Landasan Syariahnya, yaitu⁸:

1. Al-Qur'an

a. Q.S. An-Nisa' [4] : 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Q.S. Al-Baqarah [2] : 275

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

2. Al-Hadits

a. H.R. Ahmad Bin Hanbal

“Pendapatnya yang paling afdal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.”

b. H.R. Ibnu Majah

“Dari Suhaib Ar-Rumi R.A., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara

⁸Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 54

tangguh, muqradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

Peraturan Pembiayaan Murabahah tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pengertian “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”⁹ Dan telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Potensi pembiayaan murabahah dari perbankan syariah untuk nasabah semakin meningkat, maka perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program-program yang jelas untuk mencapainya. Peningkatan Pembiayaan Murabahah akan efektif paling tidak harus disertai strategi yang mencakup :

1. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
2. Peningkatan kemampuan kewirausahaan;
3. Peningkatan dalam jumlah dan kemudahan persyaratan dalam pembiayaan perbankan;
4. Pengembangan perangkat penunjang bagi peningkatan pembiayaan seperti penjaminan pembiayaan;
5. Peningkatan jaringan informasi baik pusat maupun daerah.

⁹Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan analisis dan pengumpulan data maka penelitian diadakan di kantor Unit Simpan Pinjam Syariah Sinar Mentari Kerjo Karanganyar.

¹⁰Lexy J. Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 9

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari berbagai sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah keterangan atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Berupa dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literature-literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban yang disesuaikan dengan sumber data.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan yakni dengan menggunakan logika deduktif, dengan perincian norma ditempatkan sebagai premis mayor dan data sekunder yang telah terkumpul ditempatkan sebagai premis minor. Sehingga akan mendiskusikan data sekunder dengan norma tersebut, yang pada tahap akhirnya peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah
2. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah
3. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah
4. Prinsip Operasional Koperasi Syariah

B. Akad Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Akad
2. Asas-Asas Akad
3. Ketentuan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah
4. Keabsahan Akad Pembiayaan Murabahah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah Sinar Mentari Kerjo Karanganyar
2. Upaya Penyelamatan Terhadap Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA